



Analisis Peran Dinas Pariwisata Dalam Meningkatkan Daya Tarik Wisata Lokal

Pasha Keren Hapukh, Amelia Yogi Oktaviana

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang Tahun 2023

Abstract

Received: 07 Juni 2024

Revised: 13 Juni 2024

Accepted: 20 Juni 2024

The tourism department is a key entity in managing, developing and promoting tourism destinations in a region. This research explores the role of the tourism department in formulating policies, coordinating promotional activities, and maintaining the sustainability of tourism resources. In tourism management efforts, the Tourism Office involves the community to play an active role. However, in this effort there are obstacles related to the economic burden of taxes and levies, collecting taxes that are too large can have a negative impact on the economy as a whole. Through analysis of the role of the tourism department in increasing local tourist attractions, this can provide insight into its impact on tourism growth. The findings of this research provide a basis for a better understanding of the role of tourism agencies in achieving sustainable tourism development as well as facing contemporary challenges in this area. This research aims to determine the role of the Semarang city tourism office in efforts to preserve various tourist attractions in the city of Semarang, Central Java.

Keywords: *Tourism Department, Community Participation, Management, Tourism, Economic Burden.*

(*) Corresponding Author: Pasha@students.unnes.ac.id, oktavianaameliayogi@students.unnes.ac.id

How to Cite: Hapukh, P., & Oktaviana, A. (2024). Analisis Peran Dinas Pariwisata Dalam Meningkatkan Daya Tarik Wisata Lokal. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(11), 639-647. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12794555>

PENDAHULUAN

Kabupaten Semarang, sebuah wilayah yang kaya akan sejarah dan keindahan alam, terletak di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Dengan ibu kota kabupaten berada di Ungaran, kabupaten ini menjadi destinasi menarik yang menggabungkan pesona alam, kekayaan budaya, dan keramahan masyarakatnya. Sebagai bagian dari lanskap Jawa Tengah yang kaya akan warisan sejarah, Kabupaten Semarang memiliki daya tarik sendiri yang memikat para pengunjung. Dengan begitu banyak potensi dan keunikan, mari kita telusuri lebih jauh pesona dan keistimewaan yang membuat Kabupaten Semarang layak dijelajahi.

Dinas pariwisata berperan penting dalam meningkatkan daya tarik wisata lokal. Mereka bertanggung jawab untuk mempromosikan dan mengembangkan potensi pariwisata daerah. Dinas pariwisata dapat meningkatkan jumlah daya tarik wisata lokal melalui berbagai kegiatan seperti promosi, pembangunan infrastruktur, dan pelatihan bagi pemangku kepentingan pariwisata lokal.

Promosi merupakan salah satu tugas utama dewan pariwisata untuk meningkatkan daya tarik wisata lokal. Dinas pariwisata dapat menarik wisatawan untuk mengunjungi atraksi lokal melalui kampanye pemasaran yang efektif. Mereka memanfaatkan media sosial, website, brosur, dan media lainnya untuk mempromosikan keindahan dan keunikan pariwisata lokal. Selain promosi, Dinas pariwisata juga berperan dalam pengembangan infrastruktur pariwisata lokal.

Melalui kerja sama dengan pemerintah daerah dan pihak terkait, akses dan kenyamanan wisatawan dapat ditingkatkan. Pembangunan jalan, pengembangan transportasi, dan peningkatan fasilitas umum seperti toilet umum dan tempat istirahat merupakan contoh inisiatif yang dapat dilakukan Kementerian Pariwisata untuk meningkatkan daya tarik wisata lokal. Selain itu, Dinas pariwisata juga dapat memberikan pelatihan dan dukungan kepada pemangku kepentingan pariwisata lokal. Mereka dapat mengadakan workshop, pelatihan keterampilan, dan dukungan bisnis untuk membantu pelaku kepentingan pariwisata lokal meningkatkan kualitas produk dan layanan mereka. Dengan meningkatkan kualitas pariwisata lokal, wisatawan merasa lebih puas dan cenderung merekomendasikan destinasi tersebut kepada orang lain. Dengan cara ini, pariwisata lokal dapat berkembang dan memberikan dampak positif terhadap perekonomian dan masyarakat setempat.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah kualitatif. Fokus penelitian adalah peran, dampak sosial ekonomi dan kendala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam meningkatkan daya tarik wisata lokal. Sumber data diperoleh dari wawancara, dokumentasi, dan observasi. Data dianalisis dengan interaktif melalui langkah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, dan verifikasi. Selain itu penelitian ini juga menggunakan metode studi literatur dengan Sumber literatur yang digunakan meliputi jurnal ilmiah, buku-buku referensi, artikel ilmiah, dan dokumen resmi terkait dengan bidang hukum yang menjadi fokus penelitian. Tempat penelitian dalam memperoleh informasi lebih luas dalam peranan dinas pariwisata ini, peneliti memilih Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang, yang berada di Ungaran lebih tepatnya. Teknik Pengumpulan Data, melalui a) Wawancara; b) Observasi, dan c) Analisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi dan Hambatan Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang dalam Meningkatkan Daya Tarik Wisata Lokal

Menurut Muljadi (2012:7), pariwisata muncul sebagai kegiatan berwisata atau perpindahan sementara dari tempat sehari-hari dengan tujuan menghasilkan pengalaman perjalanan bagi wisatawan. Pengembangan pariwisata melibatkan berbagai aspek, termasuk pengelolaan objek wisata, pelestarian lingkungan, pemberdayaan masyarakat setempat, dan peningkatan kualitas hidup. Hal ini mencakup upaya untuk memajukan objek wisata agar lebih menarik dan berkelanjutan, serta memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya di suatu daerah. Pengembangan pariwisata juga melibatkan aspek pemasaran, manajemen publik, dan peningkatan infrastruktur pariwisata. Dalam konteks pengembangan pariwisata, penting untuk memperhatikan aspek keberlanjutan, termasuk perlindungan lingkungan, kehidupan sosial dan budaya, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat setempat.

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Rancangan Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Semarang Tahun 2020-225 menjelaskan dalam Pasal (6) mengenai arah pembangunan kepariwisataan, sebagaimana dijelaskan dalam pasal (2) ayat 8, menjadi dasar kebijakan strategi

dan indikasi program pembangunan kepariwisataan daerah dalam kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2025. Pembahasan melibatkan aspek pembangunan Destinasi Pariwisata Khusus (DPK), pemasaran pariwisata daerah, industri pariwisata daerah, dan tata kelola kelembagaan pariwisata daerah. Pembangunan Destinasi Pariwisata Khusus (DPK), Pasal (6) mengarahkan untuk mengembangkan DPK sebagai bagian integral dari strategi pembangunan pariwisata. Fokusnya termasuk peningkatan infrastruktur, fasilitas, dan pengalaman wisata unik yang mendukung pertumbuhan sektor pariwisata. Lalu Pemasaran Pariwisata Daerah, Pasal ini mendorong penguatan upaya pemasaran pariwisata daerah. Program harus mencakup strategi pemasaran yang efektif, kolaborasi dengan sektor swasta, dan penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan daya tarik dan aksesibilitas destinasi. adapun juga Industri Pariwisata Daerah. Dalam konteks industri pariwisata daerah, pasal ini menekankan pengembangan sektor ekonomi terkait pariwisata. Hal ini mencakup pelibatan komunitas lokal, pelatihan sumber daya manusia, dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang mendukung industri pariwisata. Dan yang terakhir Tata Kelola Kelembagaan Pariwisata Daerah, Pasal (6) merinci aspek tata kelola kelembagaan pariwisata daerah. Ini mencakup pembentukan dan peningkatan lembaga-lembaga terkait pariwisata, regulasi yang mendukung pengembangan sektor, serta mekanisme pengawasan dan evaluasi kinerja kelembagaan.

Pada pasal ini seperti sebagaimana yang sudah dijelaskan, pasal ini dapat menciptakan landasan hukum dan arah kebijakan yang komprehensif untuk pengembangan pariwisata daerah dalam jangka waktu 2020-2025, dengan fokus pada DPK, pemasaran, industri, dan tata kelola kelembagaan.

Pasal (46) memiliki keterkaitan erat dengan pasal (6) yang membahas pembangunan kelembagaan pariwisata. Pasal (46) ini menguraikan tiga aspek utama terkait kelembagaan pariwisata, yaitu penguatan organisasi kepariwisataan, pembangunan sumber daya alam pariwisata, dan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan.

Pertama, dalam konteks penguatan organisasi kepariwisataan, pasal 46 memberikan dasar hukum untuk meningkatkan kapasitas dan efektivitas lembaga-lembaga yang terlibat dalam pengelolaan pariwisata. Ini melibatkan peningkatan kualitas SDM, peran lembaga dalam pengambilan keputusan, dan mekanisme kerja sama antarlembaga untuk mencapai tujuan pembangunan pariwisata.

Kedua, pembangunan sumber daya alam pariwisata menjadi fokus penting dalam konteks keberlanjutan. Pasal ini memberikan dasar hukum untuk memastikan bahwa pengembangan pariwisata tidak merusak lingkungan dan sumber daya alam yang menjadi daya tarik utama. Langkah-langkah pelestarian, restorasi, dan pengelolaan yang berkelanjutan menjadi elemen kunci dalam implementasi pasal ini.

Ketiga, pasal 46 juga menyoroti pentingnya penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dalam mendukung pertumbuhan pariwisata. Melalui penelitian, dapat ditemukan inovasi baru, strategi pemasaran yang efektif, dan pemahaman mendalam terhadap perkembangan industri pariwisata. Hal ini memberikan dasar bagi pengambilan keputusan yang lebih baik dan berkelanjutan.

Dengan demikian, pasal (46) menegaskan perlunya pendekatan holistik dalam pembangunan kelembagaan pariwisata. Penguatan organisasi, pelestarian sumber daya alam, dan dukungan penelitian dan pengembangan menjadi elemen kunci untuk mencapai tujuan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi masyarakat setempat serta lingkungan.

Dinas Pariwisata berperan penting dalam meningkatkan daya tarik wisata lokal dengan mengembangkan strategi pemasaran, promosi destinasi dan pembangunan infrastruktur pariwisata melalui kampanye yang efektif, dinas pariwisata dapat mengangkat potensi dan keunikan setiap destinasi serta menarik perhatian wisatawan lokal. Kolaborasi dengan komunitas lokal juga penting dalam menciptakan pengalaman wisata yang otentik. Pembangunan infrastruktur pariwisata yang terencana dapat memberikan kenyamanan kepada pengunjung dan juga membuat destinasi menjadi lebih menarik dan berkelanjutan. Dalam perannya ini, dinas pariwisata menjadi penggerak utama peningkatan perekonomian lokal melalui sektor pariwisata.

Dinas pariwisata memegang peran krusial dalam meningkatkan daya tarik wisata lokal melalui berbagai strategi dan inisiatif. Pertama-tama, mereka merancang kampanye pemasaran yang efektif untuk mempromosikan potensi wisata setempat. Hal ini mencakup penggunaan media sosial seperti melalui instagram, tiktok, facebook, twitter, dan memiliki website sendiri. Promosi non digital yang dilakukan melalui event, roadshow perjalanan keluar daerah seperti ke kebumen, ponorogo lalu mempresentasikan daya tarik pariwisata yang ada di kabupaten semarang, sambil mengundang guru dan kepala sekolah, lalu ada funtrip (memanggil blogger dan konten creator untuk membuat vlog dan menulis artikel) , dan travelmart (jual beli wisata) , Dinas Pariwisata juga memiliki Aplikasi dan situs web resmi tersendiri dan serta kampanye iklan untuk menjangkau khalayak yang lebih luas.

Selain itu, dinas pariwisata dapat bekerja sama dengan pelaku lokal, termasuk pengusaha hotel, restoran, dan usaha kecil lainnya, untuk meningkatkan kualitas layanan dan fasilitas. Kolaborasi ini tidak hanya meningkatkan pengalaman wisatawan tetapi juga memberikan dorongan ekonomi kepada masyarakat setempat. Pengembangan infrastruktur pariwisata yang baik juga menjadi fokus. Dinas pariwisata dapat mengadvokasi investasi dalam fasilitas seperti jalan, transportasi, dan area parkir untuk meningkatkan aksesibilitas destinasi wisata. Tidak lupa pula Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang ini juga mengedukasi masyarakat lokal tentang pentingnya menjaga kebersihan, keramahan, dan pelestarian budaya dapat dikelola oleh dinas pariwisata. Ini membantu menciptakan lingkungan yang ramah wisatawan dan berkelanjutan. Dengan menggabungkan upaya ini, dinas pariwisata dapat menjadi pionir dalam mengangkat daya tarik wisata lokal, menciptakan dampak positif bagi ekonomi dan budaya komunitas setempat.

Pemasaran wisata melalui konten dan penulisan digital di Kabupaten Semarang memiliki dampak signifikan terhadap peningkatan kunjungan wisata. Melalui strategi ini, destinasi wisata, seperti Dusun Semilir, dapat mendapatkan paparan yang luas dan meningkatkan daya tariknya. Konten yang dibuat secara kreatif dan informatif dapat menjadi daya ungkit untuk membuat destinasi tersebut menjadi viral, menarik perhatian wisatawan dari berbagai daerah.

Salah satu dampak positif dari konten yang viral adalah peningkatan jumlah pengunjung di Dusun Semilir. Wisatawan yang terinspirasi oleh konten tersebut cenderung tertarik untuk mengunjungi tempat tersebut secara langsung. Efek domino dari viralitas dapat membawa manfaat ekonomi dan sosial kepada masyarakat lokal, seiring dengan pertumbuhan sektor pariwisata.

Pemasaran digital, melalui platform seperti media sosial, memberikan kesempatan untuk mencapai audiens yang lebih luas, termasuk wisatawan dari luar kota. Dengan melibatkan penulisan wisata yang menarik dan visual yang menggoda, dinas pariwisata dapat mengkomunikasikan pesan positif tentang Kabupaten Semarang, mendorong minat, dan mengundang kunjungan. Dengan memanfaatkan kekuatan pemasaran digital, Kabupaten Semarang dapat terus mempromosikan kekayaan budaya dan alamnya, menciptakan siklus positif yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan dalam sektor pariwisata.

Dinas Pariwisata juga bertugas dalam pengelolaan tempat wisata, Mereka melakukan evaluasi terhadap perizinan dan regulasi yang terkait dengan tempat wisata tersebut. Jika ada kekurangan atau hambatan, dinas pariwisata kabupaten semarang memberikan saran untuk menyempurnakan proses perizinan, memastikan kepatuhan, dan memudahkan pengelolaan tempat wisata. Selanjutnya, terkait dengan pelatihan bagi masyarakat, dinas pariwisata dapat menggagas program pelatihan yang berfokus pada keahlian yang relevan dengan industri pariwisata. Pelatihan hotel, dan pelatihan untuk UMKM dapat memberdayakan masyarakat lokal untuk berperan aktif dalam pengembangan dan pengelolaan tempat wisata. Meskipun masyarakat yang mengelola tempat tersebut tetap berperan, pelatihan ini akan meningkatkan kualitas layanan dan memberikan kesempatan ekonomi kepada penduduk setempat.

Dalam hal ini peran dinas pariwisata bukan hanya memberikan saran, tetapi juga membimbing dan mendukung implementasi perubahan positif. Ini mencakup memberikan panduan mengenai praktik terbaik, menyusun strategi pemasaran, dan memberikan dukungan teknis bagi masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan tempat wisata. Dengan pendekatan ini, dinas pariwisata dapat memastikan bahwa tempat wisata berkembang secara berkelanjutan sambil memberikan manfaat nyata kepada masyarakat setempat, baik dari segi ekonomi maupun peningkatan keterampilan.

Dalam meningkatkan daya tarik wisata lokal di Kabupaten Semarang, Dinas Pariwisata menghadapi beberapa hambatan atau kendala dalam meningkatkan daya tarik wisata lokal, Faktor penghambatnya antara lain:

1. Hambatan terkait anggaran, Hambatan ini dapat menjadi aspek kritis dalam menjaga keberlangsungan promosi pariwisata. Perubahan anggaran yang tidak terduga atau fluktuasi dalam alokasi dana dapat menjadi kendala serius bagi Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang. Ketidakpastian anggaran dapat menghambat perencanaan jangka panjang untuk strategi pemasaran dan promosi. Rencana yang telah disusun dengan matang dapat terpaksa diubah atau dikurangi karena keterbatasan finansial, membatasi kemampuan dinas dalam mencapai tujuan promosi pariwisata. Selain itu, adanya perubahan anggaran juga dapat mempengaruhi kontinuitas kampanye pemasaran. Jika terjadi pemangkasan anggaran, dinas mungkin terpaksa mengurangi atau bahkan menghentikan kegiatan promosi tertentu, yang pada gilirannya dapat merugikan citra destinasi

pariwisata Kabupaten Semarang. Pengurangan anggaran juga dapat membatasi inovasi dan keberlanjutan program promosi, mengurangi daya saing destinasi di pasar pariwisata yang semakin kompetitif. Selanjutnya, hambatan anggaran dapat berdampak pada kualitas konten promosi. Jika anggaran terbatas, produksi materi promosi, seperti video, brosur, atau kampanye digital, mungkin harus disesuaikan atau dikurangi. Hal ini dapat mempengaruhi daya tarik dan efektivitas kampanye pemasaran, karena kualitas konten memainkan peran penting dalam menarik perhatian dan memikat minat calon wisatawan.

2. Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang saat ini belum memiliki tim internal yang secara khusus fokus pada aspek digital seperti pengeditan dan pembuatan konten. Sebagai gantinya, mereka mengandalkan kerjasama dengan rekan yang mungkin tidak memiliki keahlian khusus di bidang tersebut. Meskipun hal ini kurang efektif dan dapat mempengaruhi kualitas konten, namun hambatan ini tidak terlalu mengganggu.

3. Sejumlah tempat pariwisata yang dikelola oleh dinas masih memerlukan perhatian lebih dalam meningkatkan popularitas mereka, perlu lebih diperkenalkan atau "di-show up" agar dapat menarik perhatian pengunjung dan mencapai potensi sepenuhnya. seperti contohnya palagan ambarawa yang hanya ramai didatangi oleh anak sekolah yang study tour saja.

Pemberdayaan Masyarakat Oleh Pemerintah dalam Pengembangan Pariwisata

Dalam upaya pengelolaan tempat wisata, Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang memberdayakan masyarakat untuk turut andil dalam pengembangan desa wisata. Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan desa wisata menjadi sangat signifikan karena melibatkan pengetahuan lokal dan kebutuhan yang paling dipahami oleh masyarakat itu sendiri. Keterlibatan yang efektif mencakup partisipasi penuh masyarakat sepanjang proses pengembangan, termasuk perencanaan, pengambilan keputusan, dan pengawasan program. Tingkat partisipasi ini dipengaruhi oleh sejauh mana masyarakat memiliki keinginan, kesempatan, dan kemampuan untuk terlibat. Ketika masyarakat terlibat secara aktif dalam perencanaan desa wisata, hal ini dapat memberikan dorongan positif untuk partisipasi mereka dalam pelaksanaan program dan pengawasannya.

Pemerintah sebagai pemangku kepentingan utama dalam sektor pariwisata, memiliki tanggung jawab besar dalam menciptakan kebijakan dan program yang mendorong pemberdayaan masyarakat setempat. Jim Ife (1997) menguraikan bahwa pemberdayaan masyarakat dapat didefinisikan sebagai proses memberikan sumber daya, peluang, pengetahuan, dan keterampilan kepada anggota masyarakat. Tujuan dari pemberdayaan ini adalah untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam merumuskan arah masa depan pribadi dan berkontribusi aktif dalam upaya memengaruhi dinamika kehidupan kelompoknya.

Pemerintah dapat memberdayakan masyarakat dengan memberikan akses yang lebih luas terhadap sumber daya pariwisata. Hal ini mencakup peningkatan aksesibilitas infrastruktur dan pendekatan dalam perancangan kebijakan. Memberikan akses yang setara akan menciptakan landasan yang lebih adil bagi masyarakat setempat, memungkinkan mereka mengelola dan mengambil manfaat dari potensi pariwisata di sekitar mereka secara lebih efektif.

Pemerintah sering kali menerapkan berbagai strategi untuk mengembangkan pariwisata dengan harapan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat setempat. Namun, di balik upaya pemberdayaan masyarakat dalam konteks ini, sering kali timbul permasalahan terkait dengan beban ekonomi yang diterima oleh masyarakat akibat pemungutan pajak atau retribusi. Dalam hal ini masyarakat mendapatkan beban compliance dimana masyarakat dibebani dengan kewajiban membayar pajak atau retribusi.

Dinas Pariwisata memainkan peran penting dalam mendorong partisipasi masyarakat bagi industri pariwisata. Pemberdayaan masyarakat mencakup berbagai aspek, mulai dari ikut serta dalam pengelolaan destinasi wisata, pelatihan keterampilan agar berdaya saing, hingga promosi produk lokal. Namun, di samping upaya proaktif ini, pemerintah juga harus memastikan bahwa kebijakan pajak dan biaya tambahan yang diberlakukan tidak memberikan beban keuangan yang tidak semestinya pada masyarakat lokal. Pajak dan retribusi dianggap sebagai sumber keuangan penting bagi pemerintah untuk mendukung pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur pariwisata. Namun pengumpulan tersebut dapat menimbulkan dampak negatif, apalagi jika tidak dibarengi dengan mekanisme pengelolaan yang cerdas. Masyarakat yang tinggal di dekat destinasi wisata mungkin merasa terbebani karena harus membayar pajak dan biaya tertentu.

Salah satu bentuk beban ekonomi yang muncul adalah terkait pajak. Pemerintah daerah seringkali mengenakan biaya untuk fasilitas umum seperti penggunaan jalan, kebersihan lingkungan, dan tempat parkir. Tujuannya adalah untuk mendanai pemeliharaan fasilitas-fasilitas tersebut, namun masyarakat lokal yang terlibat dalam bisnis pariwisata mungkin merasa beban ini tidak sebanding dengan manfaat yang mereka terima.

Pajak merupakan sumber pendapatan utama negara, namun tarif pajak yang tinggi dapat berdampak negatif pada usaha kecil dan mikro, yang sebagian besar dijalankan oleh masyarakat lokal. Pajak yang berlebihan dapat menghambat pertumbuhan bisnis, membuat produk lokal menjadi kurang kompetitif, dan bahkan mendorong praktik penghindaran pajak ilegal. Pemberdayaan masyarakat tidak hanya fokus pada pelibatan masyarakat dalam aspek-aspek positif pariwisata, namun juga pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait kebijakan perpajakan dan retribusi. Partisipasi masyarakat dalam forum kebijakan membantu pemerintah lebih memahami kebutuhan masyarakat dan kinerja perekonomian.

Salah satu solusi yang dapat dipertimbangkan adalah penerapan kebijakan perpajakan dan iuran yang lebih adil dan proporsional. Pemerintah dapat mempertimbangkan sistem diferensiasi tarif dimana usaha mikro, kecil dan menengah membayar tarif lebih rendah dan perusahaan besar dan internasional membayar tarif lebih tinggi. Selain itu, transparansi dalam pengelolaan pajak dan iuran juga penting agar masyarakat memahami dan menyadari manfaat langsung dari iuran mereka. Pentingnya pendidikan juga tidak boleh diabaikan. Pemerintah harus secara aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang tujuan dan manfaat pajak retribusi yang diberlakukan.

Masyarakat yang memahami kontribusinya terhadap pembangunan pariwisata berkelanjutan mungkin akan lebih bersedia memenuhi kewajiban

perpajakannya. Saat mengembangkan pariwisata, pemerintah perlu mempertimbangkan tidak hanya potensi pendapatan tetapi juga dampak sosial dan ekonomi terhadap masyarakat lokal. Pemberdayaan masyarakat harus mempertimbangkan tidak hanya peningkatan pendapatan, tetapi juga keadilan ekonomi dan pemerataan manfaat. Dengan mengambil langkah hati-hati dalam menerapkan pajak dan retribusi, pemerintah dapat memastikan bahwa pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan pariwisata tidak menjadi beban ekonomi yang tidak dapat dikendalikan.

Kesimpulan

Hasil kesimpulan dari yang penulis buat dapat disimpulkan bahwa pengembangan pariwisata di Kabupaten Semarang melibatkan aspek-aspek strategis, seperti pembangunan Destinasi Pariwisata Khusus, pemasaran, industri, dan tata kelola kelembagaan. Pasal (6) dan (46) menjadi landasan hukum dan arah kebijakan komprehensif untuk periode 2020-2025, dengan fokus pada penguatan lembaga, pelestarian sumber daya alam, dan penelitian. Dinas Pariwisata memiliki peran krusial dalam meningkatkan daya tarik wisata lokal dengan melibatkan strategi pemasaran digital, kolaborasi dengan pelaku lokal, dan pengembangan infrastruktur. Kendati menghadapi hambatan anggaran dan kekurangan tim digital internal, dinas tetap dapat berperan aktif dalam pemberdayaan masyarakat, pelatihan, dan pengelolaan tempat wisata. Pemberdayaan masyarakat oleh pemerintah menjadi elemen penting dalam pengembangan desa wisata. Meskipun terdapat hambatan terkait pajak dan retribusi, pemerintah perlu menjaga keadilan ekonomi dan transparansi untuk mendukung pertumbuhan pariwisata yang berkelanjutan.

Untuk meningkatkan daya tarik wisata lokal, terdapat beberapa saran yang dapat dijadikan acuan. Pertama, fokus pada keberlanjutan dengan pelestarian lingkungan, kehidupan sosial, dan ekonomi masyarakat setempat. Hal ini penting untuk menjaga kelestarian alam dan budaya serta memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat setempat.

Kedua, implementasikan peraturan daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2019 sebagai landasan hukum untuk pengembangan pariwisata 2020-2025. Dengan adanya landasan hukum yang jelas, pengembangan pariwisata dapat dilakukan dengan terencana dan terukur.

Ketiga, perkuat organisasi kepariwisataan, lakukan pembangunan sumber daya alam pariwisata secara berkelanjutan, dan dorong penelitian dan pengembangan. Hal ini penting untuk meningkatkan kualitas destinasi wisata dan memberikan pengalaman yang lebih baik bagi wisatawan. Selain itu, hadirkan kampanye pemasaran digital yang efektif dan kreatif untuk meningkatkan daya tarik destinasi. Dalam era digital seperti sekarang, kampanye pemasaran yang efektif dan kreatif dapat membantu meningkatkan popularitas destinasi wisata.

Terakhir, memberdayakan masyarakat setempat melalui partisipasi aktif dalam pengelolaan destinasi, pelatihan keterampilan, dan promosi produk lokal. Dengan memberdayakan masyarakat setempat, pengembangan pariwisata dapat dilakukan dengan lebih terencana dan terukur, serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat setempat dan lingkungan. Semua saran ini diarahkan untuk mencapai pengembangan pariwisata yang berkelanjutan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat setempat serta lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- A.J., Muljadi, *Kepariwisata Dan Perjalanan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012)
- Fasyikhah, Fenty Beauty, 'Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang (Studi Kasus: Desa Lerep, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang)', 2020, 1–67
- Hariani, Aprilia, 'Pajak Untuk Pembangunan Kabupaten Semarang', *Pajak.Com*, 2023 <<https://www.pajak.com/pajak/pajak-untuk-pembangunan-kabupaten-semarang/>>
- Ife, J, *Community Development: Creating Community Alternatives : Vision, Analysis, and Practice* (Meulbore: Longman, 1997)
- Minarti, Ria Ari, and Sumiyatun Sumiyatun, 'Peran Dinas Pariwisata Kota Semarang Dalam Upaya Melestarikan Gedung Lawang Sewu Sebagai Objek Wisata Peninggalan Belanda Di Kota Semarang Jawa Tengah Tahun 2011 – 2014', *Historia*, 4.1 (2016), 29 <<https://doi.org/10.24127/hj.v4i1.398>>
- Pemerintah Kabupaten Semarang, 'PERATURAN DAERAH NO 9 TAHUN 2019 Tentang Rencana Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Semarang Tahun 2020- 2025', 2019 <<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/149346/perda-kab-semarang-no-8-tahun-2019>>
- Wiraloka, Pradipta, and Mochamad Djudi Mukzam, 'PERAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA DALAM PENGEMBANGAN OBJEK WISATA (Studi Pada Pengembangan Objek Wisata Kayangan Api Oleh Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro)', *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*/Vol, 52.1 (2017), 206–13